



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 November 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DODY HANGGODO**
2. Jabatan : **MENTERI**
3. NHK : **978874**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **40.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/375 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/122 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/107 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/1 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/1 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **5.720.000.000**

1. MOBIL, HONDA HBRVDG215LPRECVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOBIL, VOLVO XC90P4 HP 2.0L 4X4 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. MOBIL, MINI COOPER S COUNTRYMAN F60 CKD A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. MOBIL, LEXUS LEXUS LM 350 4X2 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.100.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	8.206.033.755
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.034.883.589
F. HARTA LAINNYA	Rp.	6.500.000.000
Sub Total	Rp.	92.310.917.344
III. HUTANG	Rp.	17.090.445.751
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	75.220.471.593

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.